



LKjIP 2022

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



pupr50kota



pupr50kota

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan kesempatan yang diberikan-Nya jugalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan. LKjIP ini pada dasarnya merupakan laporan yang menggambarkan sejauh mana pencapaian kinerja dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun. Yang digambarkan dalam LKjIP tersebut adalah capaian realisasi fisik dan keuangan serta beberapa indikator kegiatan seperti *input*, *output*, dan *outcome*.

Dalam LKjIP ini juga digambarkan mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta visi, misi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun penyusunan LKjIP ini didasarkan pada Pasal 4 bab II Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu aturan terkait lainnya adalah Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai sebuah laporan, tentunya tidak luput dari kekurangan. Karena itu diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke depan. Demikianlah laporan ini disusun dan disampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terimakasih.

Tabek Panjang, Februari 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



RILZA HANIF, SST
NIP. 19720625 199202 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Presiden ini pasal 4 Bab II mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan akhir tahun yang harus disampaikan oleh setiap Instansi Pemerintah termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD). LKjIP yang dibuatkan oleh Instansi Pemerintah bertujuan untuk :

- a. Menampilkan dan melaporkan realisasi kinerja sampai akhir tahun berdasarkan target kinerja yang ditetapkan diawal tahun anggaran.
- b. Menyampaikan penjelasan terhadap realisasi target kinerja serta dukungan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.
- c. Menyampaikan perubahan target kinerja pada pertengahan tahun jika ada serta realisasinya.

1.2 Tugas dan Wewenang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah instansi pelaksana Pemerintah Daerah dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan Pertanahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang infrastruktur diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang serta Bidang Pertanahan sesuai kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidangpertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidangpertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Keuangan.
3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi program dan pelaporan.

c. Bidang Bina Marga, terdiri dari:

1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan dan evaluasi bina marga.
2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pembangunan jalan dan jembatan.
3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi preservasi jalan jembatan.

d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :

1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan dan evaluasi sumber daya air.

2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pelaksanaan sumber daya air.
3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :

1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan dan evaluasi cipta karya.
2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengembangan sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman.
3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi tata bangunan.

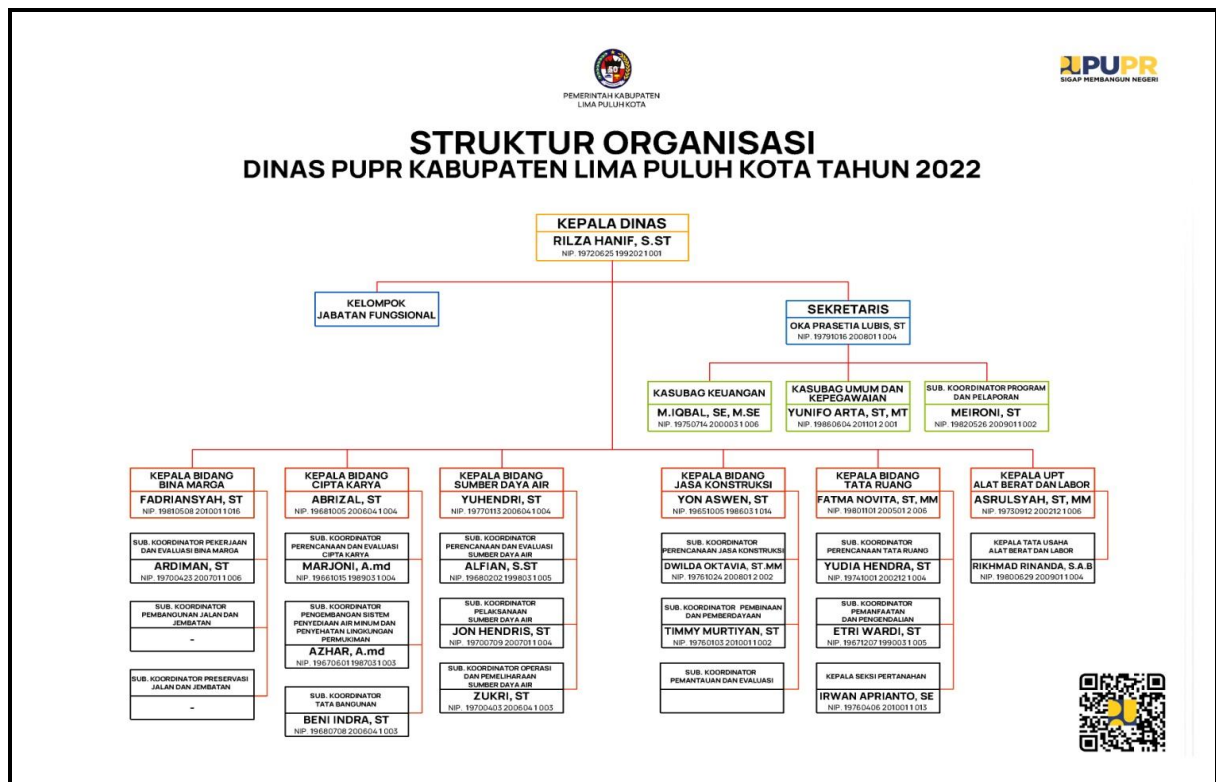
f. Bidang Jasa Konstruksi, terdiri dari:

1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan jasa konstruks.
2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pembinaan dan pemberdayaan.
3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemantauan dan evaluasi.

g. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:

1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan tata ruang.
2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemanfaatan dan pengendalian.
3. Seksi Pertanahan.

h. UPT



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota

1.4 Isu-isu Strategis

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan oprogram dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimaksud sebagai berikut :

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD sudah baik namun karena keterbatasan anggaran maka masih banyak kebutuhan dan usulan masyarakat yang belum terpenuhi.
2. Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD :
 - Adanya tunda bayar dibebberapa rekening kegiatan.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap

capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);

- Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan baik, akan mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.
- Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan baik juga ikut menyukseskan tercapainya program nasional dan internasional di bidang infrastruktur.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diantaranya :

- Keterbatasan APBD dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang baik
- Keterbatasan jumlah personil

Peluang dalam meningkatkan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diantaranya :

- Masyarakat mempunyai harapan yang besar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan siap mendukung program yang dilaksanakan.
- Tersedia peluang meraih dana dari pemerintah pusat untuk peningkatan infrastruktur.

5. Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

- Adanya prioritas usulan kegiatan yang sangat dibutuhkan masyarakat
- Adanya prioritas kegiatan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta program nasional/ internasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi tentang pembahsan latar belakang, tugas dan wewenang, struktur organisasi, isu-isu strategis, dan sistematika penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab perencanaan dan perjanjian kinerja berisi tentang rencana strategis dan perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi tentang metodologi pengukuran capaian target kinerja, hasil pengukuran kinerja, analisis dan capaian kinerja, dan realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUPAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari laporan dan langkah peningkatan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021-2026 telah disusun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021-2026 menampilkan Target Kinerja dan Pagu Indikatif selama 5 tahun yang dirinci pertahun.

Dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021-2026 menampilkan hal sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung	Percepatan pembangunan gedung pemerintahan dan gedung strategis	1. Perbaikan Gedung Pemerintah yang mulai rusak 2. Pembangunan Gedung baru di IKK Sarilamak
	Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis	1. Pemusatan Kantor Pemerintah di IKK Sarilamak 2. Pelestarian Gedung Bersejarah
Meningkatkan Kualitas Jalan	Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan secara merata	Diprioritaskan pada ruas jalan kabupaten dan menjadi program unggulan
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Prioritas pada jalan yang terdapat genangan dan belum ada saluran drainasenya
	Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi	Pembinaan Lembaga dan tenaga terampil konstruksi	Mengadakan pelatihan terampil konstruksi dan memfasilitasi penyedia Sertifikat Terampil.
Meningkatkan Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan penyediaan akses air minum layak dan aman.	Mengutamakan kawasan permukiman yang belum mendapatkan layanan air minum
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Percepatan pembangunan sarana sanitasi yang layak	Mengutamakan kawasan permukiman yang belum memiliki sarana sanitasi dan pengelolaan air limbah
	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Pembangunan TPA/TPST/TPS
	Meningkatnya Pengembangan Permukiman	Peningkatan infrastruktur di kawasan permukiman	Peningkatan kualitas jalan dan sarana drainase di kawasan permukiman
Meningkatkan Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Penambahan kapasitas peningkatan pemanfaatan fungsi tampungan air, peningkatan kinerja bendungan dan penurunan indeks resiko bendungan, peningkatan dan efisiensi kinerja sistem irigasi, dan penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi.	1. Pemeliharaan dan peningkatan daerah irigasi supaya maksimal memenuhi areal cakupannya 2. Normalisasi dan pengamanan tebing sungai
Meningkatkan kinerja Penataan ruang wilayah	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Mewujudkan kesesuaian rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang	Kontrol dan Pengawasan yang kuat terdapat permohonan masyarakat dalam pemanfaatan ruang
	Meningkatnya Pengelolaan Izin Lokasi	Kemudahan dalam memberikan Rekomendasi Izin Lokasi Penanaman Modal	Prioritas untuk usaha di bidang pertanian dan perikanan
	Meningkatnya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Memfasilitasi proses pengadaan tanah	Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan sarana pemerintah
	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa	Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan	Prioritas memfasilitasi tanah pemerintah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Tanah Garapan		
	Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Memfasilitasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Prioritas memfasilitasi ganti rugi untuk pembangunan sarana umum dan pemerintah
	Meningkatnya Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Memfasilitasi Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Prioritas memfasilitasi redistribusi tanah yang digunakan untuk kepentingan umum dan sarana pemerintah
	Meningkatnya Penetapan Tanah Ulayat	Memfasilitasi Penetapan Tanah Ulayat	Prioritas tanah ulayat yang telah diakui dan dikukuhkan Masyarakat Hukum Adat
	Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong	Memfasilitasi Pengelolaan Tanah Kosong	Prioritas tanah kosong digunakan untuk kepentingan umum dan kegiatan untuk meningkatkan perekonomian
	Meningkatnya Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Memfasilitasi Izin Membuka Tanah	Mengawal pemanfaatan tanah negara agar sesuai peruntukan
	Meningkatnya Penatagunaan Tanah	Menata penggunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota	Mengontrol penggunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 2.2
Arah Kebijakan, Program dan Indikator Program

Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	
		Uraian	Satuan
Perbaikan Gedung Pemerintah yang mulai rusak	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang layak	%
Diprioritaskan pada ruas jalan kabupaten dan menjadi program unggulan	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%
Mengutamakan kawasan permukiman yang belum mendapatkan layanan air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	%
Mengutamakan kawasan permukiman yang belum memiliki sarana sanitasi dan pengelolaan air limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	%
Pemeliharaan dan peningkatan daerah irigasi supaya maksimal memenuhi areal cakupannya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	%
Kontrol dan Pengawasan yang kuat terhadap permohonan masyarakat dalam pemanfaatan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%

Tabel 2.3
Indikator Program serta Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Program		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021-2026)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Uraian	Satuan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Jumlah gedung yang dibangun dan ditingkatkan	unit	12	3.145.000.000	18	30.820.000.000	25	31.744.000.000	32	32.696.000.000	39	33.677.000.000	46	34.688.000.000
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	km	614,58	150.000.000.000	628,23	154.690.000.000	645,85	159.379.000.000	660,17	164.069.000.000	676,47	169.033.000.000	691,33	174.104.000.000
Panjang saluran drainase primer yg terbangun	m	3680	6.368.520.000	4232	3.479.270.000	4866,8	5.262.400.000	5597	5.833.300.000	6436	6.273.960.000	7402	8.595.540.000
Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan	sertifikat	90	550.429.800	65	422.240.000	65	460.000.000	65	460.000.000	63	400.000.000	68	538.120.000
Persentase Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota	%	100	100.000.000	100	125.000.000	100	390.310.000	100	390.310.000	100	461.210.000	100	566.210.000
Jumlah Rekomendasi IUJK Nasional yang diterbitkan		0	0	10	105.000.000	28	272.240.000	28	257.240.000	28	257.240.000	30	420.000.000
Persentase Monitoring dan evaluasi kegiatan Jasa Konstruksi	%	55	241.740.200	60	125.000.000	70	220.000.000	80	220.000.000	90	220.000.000	100	320.000.000
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air bersih	rumah	340	7.000.000.000	440	9.000.000.000	450	9.270.000.000	460	9.548.000.000	460	9.834.000.000	460	10.129.000.000
Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	rumah	58.781	9.333.000.000	58.926	10.750.000.000	59.076	11.072.000.000	59.231	11.404.000.000	59.386	11.746.000.000	59.541	12.099.000.000
Jumlah sampah yang terkelola	ton	0	0	200	1.927.630.000	230	5.501.600.000	240	3.888.870.000		4.127.610.000		5.505.650.000
Jumlah Kawasan Permukiman yang telah dilengkapi infrastrukturnya		0	0	12	1.159.760.000	19	1.855.130.000	20	2.123.530.000	20	2.259.570.000	22	3.061.810.000
Persentase Sumber Daya Air yang terkelola/ terpelihara	%	79	3.668.530.500	80,12	13.350.000.000	81,25	8.800.000.000	82,36	9.450.000.000	83,49	7.909.000.000	84,62	8.995.000.000
Persentase jaringan irigasi yang terkelola	%	80	31.863.735.600	80,60	39.600.000.000	81,22	45.738.000.000	81,84	46.724.000.000	82,46	49.950.000.000	83,08	50.600.000.000
Jumlah ditetapkan Peraturan Daerah RTRW dan Peraturan Daerah RDTR Kawasan	dokumen	1	570.000.000	1	510.000.000	1	410.000.000	1	540.000.000	1	560.000.000	1	620.000.000
Jumlah perencanaan tata ruang yang telah ada	dokumen	1	100.000.000	3	400.000.000	6	560.000.000	8	490.000.000	11	520.000.000	14	540.000.000
Jumlah pemanfaatan tata ruang yang telah sesuai	lokasi	10	180.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	210.000.000	20	200.000.000
Jumlah pemanfaatan Ruang yang dapat dikendalikan	lokasi	10	149.000.000	2	80.000.000	2	90.000.000	2	100.000.000	2	110.000.000	2	110.000.000
Jumlah Izin Lokasi yang direkomendasikan		0	0		81.380.000		138.200.000		153.510.000		169.820.000		224.720.000
Terlaksananya Pengadaan Tanah	kapling	0	0	2	406.930.000	2	531.560.000	2	511.690.000	2	471.720.000	2	561.800.000
Jumlah penyelesaian sengketa tanah garapan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi	kasus	3	144.940.000	3	101.730.000	3	148.840.000	3	163.740.000	3	169.820.000	3	219.110.000

Indikator Program		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021-2026)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Uraian	Satuan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang difasilitasi		0	0	2	300.000.000	2	309.000.000	2	318.270.000	2	327.820.000	2	0
Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi			0	2	343.210.000	2	402.820.000	2	382.160.000	2	325.600.000	2	400.000.000
Jumlah Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi			0	2	80.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	165.000.000	2	184.270.000
Jumlah Tanah Ulayat yang ditetapkan yang difasilitasi			0	5	150.560.000	5	196.680.000	5	189.330.000	5	174.540.000	5	207.860.000
Persentase penyelesaian masalah tanah kosong			0	2	60.000.000	2	89.200.000	2	80.260.000	2	70.000.000	2	80.000.000
Persentase tanah kosong yang telah dimanfaatkan		0	0	2	123.120.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	142.280.000	2	172.810.000
Persentase izin yang diterbitkan		20	103.280.000	20	146.500.000	20	201.990.000	20	204.680.000	20	202.840.000	0	263.480.000
Jumlah penggunaan tanah yang difasilitasi	kapling	2	70.210.000	2	155.470.000	2	213.710.000	2	205.730.000	0	0	0	185.390.000
Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	160.804.000	100	257.804.000	100	242.000.000	100	283.000.000	100	290.000.000	100	315.000.000
Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD	%	100	6.651.473.155	100	7.642.985.732	1000	8.024.985.019	100	8.434.884.270	100	8.863.628.483	100	9.314.209.907
Persentase terdatanya seluruh barang milik daerah	%	100	0	100	39.000.000	100	42.000.000	100	46.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000
Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100.000.000	100	120.000.000	100	350.000.000	100	175.000.000	100	450.000.000	100	225.000.000
Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	488.896.674	100	915.000.000	100	915.000.000	100	942.000.000	100	968.000.000	100	997.000.000
Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	71	0	74	2.625.000.000	76	3.440.000.000	78	244.000.000	80	4.087.000.000	82	266.000.000
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	738.840.000	100	810.000.000	100	846.200.000	100	879.400.000	100	912.600.000	100	954.800.000
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	62	807.556.000	65	2.330.000.000	68	2.590.000.000	70	2.680.000.000	72	3.177.000.000	75	3.362.000.000

Indikator Program		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021-2026)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Uraian	Satuan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													

Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis		Persentase Gedung Strategis Yang Terbangun (%)
		Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang layak (%)
		Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata (%)
2	Meningkatkan Kualitas Jalan		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten
		Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik (%)
		Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina (%)
3	Meningkatkan Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat		Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%)
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (%)
		Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan (%)
		Meningkatnya Pengembangan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman yang telah dikembangkan (%)
4	Mengoptimalkan Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi
		Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)
5	Meningkatkan kinerja Penataan ruang wilayah		Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)
		Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)
		Meningkatnya Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase cakupan pengelolaan Izin Lokasi (%)
		Meningkatnya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Fasilitasi Pengadaan Tanah (%)
		Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan (%)
		Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)
		Meningkatnya Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah diselesaikan (%)
		Meningkatnya Penetapan Tanah Ulayat	Persentase fasilitasi penetapan Tanah Ulayat (%)
		Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang telah dikelola (%)
		Meningkatnya Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase izin membuka tanah yang difasilitasi (%)
		Meningkatnya Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
6	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
7	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
			Indeks Reformasi Birokrasi
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 2.5
Target Kinerja Tahun 2021-2026 dalam Renstra

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Persentase Bangunan Gedung yang layak (%)	68	71	75	77	80	85
Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata (%)	50	55	60	65	70	75
Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	55,81	57,05	58,65	59,95	61,43	62,78
Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik (%)	42	44	46	48	50	52
Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina (%)	95	100	100	100	100	100
Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%)	81,62	83,12	84,72	86,42	88,22	90,12
Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (%)	78,45	80,05	81,65	83,35	85,05	86,85
Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan (%)	0	5	20	30	40	50
Persentase Kawasan Permukiman yang telah dikembangkan (%)	0	10	20	30	40	50
Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)	77,52	78,32	79,12	79,92	80,72	81,52
Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	65	70	75	80	85	90
Persentase cakupan pengelolaan Izin Lokasi (%)	0	2	2	3	3	4
Persentase Fasilitas Pengadaan Tanah (%)	0	2	2	2	2	2
Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan (%)	100	100	100	100	100	100
Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	0	30	25	25	20	0
Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah diselesaikan (%)	0	20	20	20	20	20
Persentase fasilitasi penetapan Tanah Ulayat (%)	0	20	20	20	20	20
Persentase Tanah Kosong yang telah dikelola (%)	0	20	20	20	20	20
Persentase izin membuka tanah yang difasilitasi (%)	30	40	50	60	70	80
Persentase penatagunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	20	20	20	20	0	20
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	78,05	78,50	78,92	79,45	79,85	80,5
Indeks Reformasi Birokrasi	24,14	26,14	28,24	30,34	32,44	34,54
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	0,742	0,762	0,782	0,802	0,822	0,842

2.2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pada awal tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan irigasi	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	57,05%
		Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	83,02%
2	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	83,12%
		Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	78,05%
3	Meningkatnya penataan ruang kawasan yang sesuai RTRW	Persentase ketaatan terhadap RTRW	70%
4	Meningkatnya Reformasi Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80,55

Selanjutnya target Perjanjian Kinerja inilah yang diukur dalam pembuatan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Pengukuran Capaian Target Kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi kinerja pada akhir tahun untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

Tabel 3.1
Formulasi untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama	Formula / Dasar Perhitungan
Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang}}{\text{Total panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$
Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas Daerah Irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Total Luas Daerah Irigasi kewenangan kabupaten}} \times 100\%$
Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapat layanan air bersih}}{\text{Total seluruh KK}} \times 100\%$
Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapat layanan sarana sanitasi yang layak}}{\text{Total seluruh KK}} \times 100\%$
Persentase ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$
Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat

Hasil pengukuran capaian kinerja ini dibandingkan dengan target kinerja untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan juga diuraikan secara jelas.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Klasifikasi penilaian berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2018

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Hasil Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Meningkatnya kualitas jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	57,05%	58,02%	101,7%	Sangat Tinggi
		Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	83,02%	84,45%	101,72%	Sangat Tinggi
2	Meningkatkan layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	83,12%	81,7%	98,29%	Sangat Tinggi
		Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	78,05%	80,05%	102,56	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah	Persentase ketaatan terhadap RTRW	70%	70%	100%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Reformasi Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80,55%	77,64%	96,39%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja					100,11%	Sangat Tinggi

3.3. Analisis dan Capaian Kinerja

3.3.1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kualitas jalan

Realisasi target kinerja dari sasaran strategis ini sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja (Sasaran Strategis 1)

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
1	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	55,81%	55,73 %	57,05%	58,02%
2	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	77,52%	82,89%	83,02%	84,45%

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat diterangkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2022 ditargetkan 57,05% dan terealisasi 58,02% atau meningkat 2,29% dibandingkan tahun 2021. Tingkat capaian indikator kinerja persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2022 ditargetkan 83,02% dan terealisasi 84,45 atau meningkat 1,56%.

a. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap

Program dan Kegiatan utama untuk mendukung pencapaian Target IKU ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Program dan Kegiatan utama untuk mendukung pencapaian Target IKU
Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
1	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	90.484.875.840	68.775.715.007	21.709.160.833	76,01

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	790.857.200	104.900.000	685.957.200	13,26
		Rekonstruksi Jalan	61.895.479.000	45.375.743.447	16.519.735.553	73,31
		Pemeliharaan Berkala Jalan	23.522.962.900	19.613.120.726	3.909.842.174	83,38
		Pemeliharaan Rutin Jalan	2.350.000.000	2.272.239.227	77.760.773	96,69
		Pembangunan Jembatan	1.590.576.740	1.229.967.607	360.609.133	77,33
		Pemeliharaan Berkala Jembatan	335.000.000	179.744.000	155.256.000	53,66

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisaasi keuangan untuk program penyelenggaraan jalan masih 76,01% untuk tahun 2022. Hal ini disebabkan karena adanya tunda bayar terhadap kegiatan pada program penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Jalan kabupaten yang telah direkonstruksi adalah sebagai berikut:

1. Jalan Kabupaten Kubu Tengah - Batang Linjuang Nagari Tanjung Bungo
2. Rekonstruksi Jalan DAK Reguler Paket 2
 - a. Pakan Rabaa-Lareh Ronah
 - b. Simp. Lubuak Alai-Lubuak Alai
 - c. Lubuak Batingkok-Taeh Bukik
3. Rekonstruksi Jalan DAK Reguler Paket 1
 - a. Suliki-Simp Sei. Dadok
4. Rekonstruksi Jalan DAK Penugasan
 - a. Sarilamak-Solok Bio-Bio
 - b. Simp Sei Mangkirai-Sei Mangkirai
5. Rekonstruksi Jalan DAU Paket 3
 - a. Koto Tangah Koto Lamo-Tj. Bungo
 - b. Muaro Paiti-Koto Bangun
 - c. Pembangunan Jalan Aspal Beton Kasang Data Durian Tinggi
 - d. Aspal Beton Jalan Bakti Jorong Aur Duri Nagari Muaro Paiti
6. Jalan SDN 04 Mungka ke Lobuah Tengah
7. Lapen Jalan Utama Jorong Purwajaya Nagari Sarilamak
8. Lanjutan Aspal Jalan SDN 03 Batu Payuang - Lareh Nan Panjang Kecamatan LSH
9. Pengaspalan Jalan Lobuah Tengah

10. Jalan Siamang - Mudiak Liki Seg. Taratak Suliki
11. Lapen Jalan Gang Mulyo Jorong Purwajaya Nagari Sarilamak
12. Jalan Lobuah Tengah Padang Harapan Nag. Mungka
13. Rekonstruksi Jalan DAU Paket 1
 - a. Pembangunan jalan aspal beton Harau-Gantiang
 - b. Simp. Sugiran- Suayan
 - c. Padang Laweh-Talang Maua
 - d. Batu Payuang-Sitanang segmen Siapi-api
14. Rekonstruksi Jalan DAU Paket 2
 - a. Baruah Gunuang-Puskesma Baruah Gunuang
 - b. Bukik Apik Luak Begak-Talang Anau
 - c. Maek-tanjung Bungo segmen Maek Nenan
 - d. Jalan Baruah Gunuang Puah Nagari Baruah Gunuang
15. Galugua - Koto Tengah (R-53)
16. Pembangunan Jalan Aspal Beton Aie Putie - Gantiang (Padang Tarok) Harau
17. Rabat Beton Jalan Tanjung bungo – Lolo
18. Lapen Jalan Gang Perdagangan Jorong Purwajaya Nagari Sarilamak
19. Rabat Beton Jalan Padat Karya Pauh Anok Lubuk Tabuan
20. Pengaspalan Jalan Simpang Empat Lubuak Surian - Pincuran Botuang
21. Rabat Beton Jalan Guci Spanjang Jrg. Mungka Tengah Nag. Mungka
22. Jl. Produksi Batu Banyak Jorong Bukik Bulek Nagari Banja Laweh
23. Jalan Poros Rimbo Data Kec. Pangkalan
24. Peningkatan Jalan Lingkar Jorong Penago
25. Jalan Lapen Koto Tinggi Maek
26. Peningkatan Jalan Lingkar Jorong Kampuang Dalam
27. Peningkatan Jalan Tampuniak Kuranji
28. Peningkatan Jalan Sungai Ipuh Mudiak Coran
29. Pembukaan Jalan Baru Solok Bio - Bio ke Harau
30. Peningkatan Jalan Lompek - Pamosian Nagari Halaban Kec. Lareh Sago Halaban
31. Pembukaan Jalan dari Aia Putih ke Buluh Kasok Nagari Sarilamak
32. Jalan Kayu Tanam – Bakiak
33. Lapen Jalan Jorong Banja Ranah Jorong Banja Ranah Nagari Pangkalan
34. Rabat Beton Jalan Mangunai Solok Mangunai Godang Sektor Padang Marantiah Nagari Ampalu
35. Pembukaan Jalan Pemukiman Masyarakat Sawah Luar - Koto Malintang
36. Jalan Simpang SD 03 Jr. Lareh Nan Panjang Nag. Batu Payuang

37. Jalan Sauik Nagari Limbanang
38. Jalan Kereta Api - Polsek Guguak
39. Labuah Gunuang - Kayu Tanam - Paki
40. Jalan Alang Laweh - Mangunai
41. Ruas Tanjung Batu Nan Balah
42. Lanjutan SD 03 Nagari Batu Payuang
43. Jalan Koto Tinggi - Sei. Dadok
44. Jalan Solok / Bukik Ambacang
45. Pembukaan Jalan Penghubung Nagari Durian Tinggi ke Nagari Koto Lamo
Jalan Bukik Potai - Lolo (Pembayaran Sisa Kontrak)
46. Rabat Beton Jalan Banja Ronah
47. Pengaspalan Jalan Kayu Tanam Bakiak Jorong Dusun Nan Onam Nagari
Labuh Gunung Sektor Pakih
48. Jalan Simpang Batu Labi - Batu Labi
49. Jalan Sei. Rimbang - Padang Longang
50. Sp. Subarang Tabek - Subarang Tabek
51. Jalan Surau Datuak Oji ke Pincuran 7
52. Jalan Aia Sonsang Talago
53. Jalan Gurun - Sei. Data
54. Pembukaan Jalan dari Pulau Tonga ke Jembatan Gantung Jr. Ronah Nag.
Durian Tinggi
55. Lanjutan Pembukaan Jalan Muaro Pingan - Mudiak Simpang Nagari Koto
Lamo
56. Jalan Simpang 4 - Puskesmas Guntuang

Pemeliharaan Berkala Jalan adalah sebagai berikut :

1. DAM Jalan Siamang Bunyi - Mudiak Liki Seg. Jariangau
2. Jl. Padang Kubin Jr. Ketinggian Guguak VIII Koto
3. Manggis - Batas Kota (R-105)
4. Tanjuang Gadang Rumah (R-092)
5. Rabat Beton Bahu Jalan Labuah Gunuang - Kayu Tanam
6. Lanjutan Lapen Jalan Taratak Tanjung Pati ke Tanjung Koto Tuo
7. Rabat Beton Jalan Lingkar Nagari (Jalan Simpang Langau) Jr. Bintungan
Sakti Nag. Durian Tinggi Kec. Kapur IX
8. Ruas Simpang Muaro ke Talang Anau
9. Pemeliharaan Berkala Jalan DAK Penugasan
 - a. Taram-Sitanang

10. Pemeliharaan Berkala Jalan DAU Paket 3
 - a. Lubuak Alai-Koto Lamo
11. Rabat Beton Bahu Jalan Padang Loweh Kampung Tengah
12. Rabat Beton Bahu Jalan Pakan Rabaa - Balai Panjang
13. Pemeliharaan Berkala Jalan DAU Paket 1
 - a. Koto Tengah-Guntuang
 - b. Sei. Beringin-Simp. KUD
 - c. Batu Hampa-Suayan
14. Pemeliharaan Berkala Jalan DAU Paket 2
 - a. Taram-Bukik Limbuku Segmen Taram Batas Kota
 - b. Taram-Kapalo Banda Segmen Surau Tuo
 - c. Labuah Gunuang-Sitanang Segmen Sitanang-Jembatan Kampai
15. Jl. Simpang Kubang Tungkek - Mungka
16. Jl. Lingkar Belakang Pasar Limbanang - Ikua Parik
17. Pembangunan DAM Jalan Kabupaten
18. Jalan VIII Kampuang - Batuang Tuneh Nagari Sei. Kamuyang
19. Rabat Beton Bahu Jalan (R-91) Nagari Durian Gadang
20. DAM Dinding Jalan Ampang Godang 1
21. DAM Bahu Jalan (R-91) Segmen Sungai Cubadak - Durian Gadang
22. Jalan Perjuangan Sibaladuang Madang Kadok
23. Pembangunan Rabat Kiri Kanan Jalan Kabupaten
24. Rabat Beton Jalan Kabupaten Nagari Situjuah Batuah
25. Kp. Baru - Sungai Naniang (R-150)
26. Bukik Kambuik - Banda Raik (R-101)
27. Pengaspalan Jalan Koramil Kec. Luak
28. Jl. Padang Kalumpang Jr. Balubih Sei. Talang
29. Jalan Batu Tanyuah Nagari Koto Tengah Batu Hampa
30. Jalan Bakti Muaro Paiti
31. Rabat Beton Bahu Jalan Pakan Sinayan - Padang Balimbiang Bukik Sikumpa
32. Jl. Lompek - Pamusian
33. Simpang Kampuang Dalam Jrg. Kampuang Dalam Limbanang
34. Rabat Bahu Jalan Pakan Sinayan - Pakan Rabaa
35. Pemeliharaan Jalan Limbanang - Mungka Seg. Terminal Limbanang
36. Lakuang - Kp. Padang (R-184)
37. Bahu Jalan Pakan Sabtu - Mungo R 41 Segmen Balai Gadang Ateh Nagari Mungo

38. Lanjutan Rabat Beton Bahu Jalan Pakan Rabaa - Lareh Nan Panjang Nagari Batu Payuang
39. Jalan Kabupaten Segmen R 121 Jorong Bukit Gombak Situak Nagari Mungo
40. Jalan Kabupaten Segmen R 121 Jorong Talaweh Nagari Mungo
41. Bahu Jalan Tungka Barulak Sektor Dalam Nagari Tungka
42. Bahu Jalan Simpang SMA N 1 Lareh Sago Halaban
43. Pemasangan Batu Pengamanan Badan Jalan Pemukiman Padang Pun Kandang Lamo Jorong Sarilamak
44. Jalan Depan Perhubungan
45. Koto Anyia Mungka
46. Jl. Tanjung Batauk Kubang Tungkek
47. Rabat Beton Bahu Jalan Jr. Labuah Lintang Nag. Sungai Antuan
48. Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan DAK Penugasan
49. Bahu Jalan di Sungai Rimbang
50. Jl. Toruan Batang Linjuang Nag. Tj. Bungo Kec. Suliki
51. Jalan Depan Dispora
52. Jalan Jorong Panam Tanjung Balik
53. Jalan R-121 Jorong Pincuran Tinggi
54. Jalan Sp. Situjuah Batua - Situjuah Batua
55. Jl. Simp. Rubik Mungka

Pemeliharaan Rutin Jalan adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Rutin Jalan Secara Swakelola

Pembangunan Jembatan adalah sebagai berikut:

1. Jembatan Simp. Sugiran (Tuak Amat)
2. Pembangunan Jembatan Titian Godang
3. Pembangunan Jembatan Lurah Cipuk Jorong Koto Marapak Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh
4. Plat Duker Ruas Jalan Pakan Sinayan Pakan Rabaa Segmen Batu Badarah
5. Jembatan Sugak Talang Maua

Pemeliharaan Berkala Jembatan adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Jembatan Suliki Sungai Dodok Segmen Koto Tangah Nag. Koto Tangah



Gambar 3.1

Rekonstruksi Jalan Suliki- Simp. Sei dadok Kec. Bukik Barisan-Kec. Lareh Sago Halaban



Gambar 3.2

Rekonstruksi Jalan Sarilamak-Solok Bio-Bio Kec. Harau

Paket	Rekon DAU paket 3 kabupaten 50 kota
Ruas	koto bangun-muaro paiti
Pekerjaan	Ac - bc
STA	0+800
Kondisi	100%
Koordinat	0,2437, 100,5286



Gambar 3.3

Rekonstruksi Jalan Koto Bangun-Muaro Paiti Kec. Kapur IX



Gambar 3.4
Pemeliharaan Jalan Taram-Sitanang Kec. Harau-Kec. Lareh sago Halaban



Gambar 3.5
Pemeliharaan Jalan Sei Beringin-Simp. KUD Kec. Payakumbuh

b. Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik

Program dan Kegiatan utama untuk mendukung pencapaian Target IKU ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Program dan Kegiatan utama untuk mendukung pencapaian Target IKU
luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
1	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.742.585.000	1.733.119.196	9.465.804	99,46
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	204.285.000	200.570.196	3.714.804	98,18
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	191.250.000	190.489.000	761.000	99,60

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
		Normalisasi/Restorasi Sungai	1.347.050.000	1.342.060.000	4.990.000	99,63
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.429.002.999	8.023.405.587	1.405.597.412	85,09
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	134.282.000	132.656.000	1.626.000	98,79
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	654.500.000	650.496.000	4.004.000	99,39
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	7.271.658.968	6.008.268.487	1.263.390.481	82,63
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.354.687.031	1.218.135.100	136.551.931	89,92
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	13.875.000	13.850.000	25.000	99,82

Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan pada tahun 2022 diantaranya sebagai berikut:

1. Pembangunan Irigasi Batang Liki Kampuang Dalam
2. Pembangunan Saluran Jaringan Irigasi Sawah Ibu (Lanjutan)
3. Pembangunan Irigasi Banda Topi Padang Loweh ke Rambek Jorong Simpang Tiga Kenanga Nag. Sungai Antuan
4. Pembangunan Irigasi Jorong Koto Tinggi 3
5. Pembangunan Saluran Irigasi Jorong Tanjuang Ateh Nagari Taram Kec. Harau
6. Pembangunan Irigasi Lobuah Putu
7. Pembangunan Saluran Irigasi Sei. Gemuru Koto Bangun

Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan pada tahun 2022 diantaranya sebagai berikut:

1. D.I Sarasah Tanggo
2. D.I Lurah Cimpago
3. D.I Namang Simalanggang
4. D.I Bdr Sandaran Bubua
5. D.I Solok Barunbun
6. Irigasi Tali Bandar Batu Godang Kampung Tengah Atas Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka
7. Irigasi Bigau Jorong Bigau Baruah Gunuang
8. Irigasi Bondar Bawah Joriang Jorong Sialang Nagari Tungka
9. Irigasi Lakuak Ambacang - Jorong Simpang Empat
10. Irigasi Lam Koto Jorong Tanjuang Haro Utara

11. Irigasi Luak Pandan - Luak Joki
12. Irigasi Lurah Tamodang Jorong Balai Gadang Atas Nagari Mungo Kec. Luak
13. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Tunggua Hitam Jorong Pauah Nagari Baruah Gunuang
14. D.I Bulakan Bawah Jorong Kayu Bajajar Padang Laweh Nagari Mungo Kecamatan Luak
15. D.I Lurah Balai Mungo Bawah Nagari Mungo
16. Irigasi Tali Bandar Topi Dusun Rambek Jorong Simpang Tiga Kenanga Nagari Sei. Antuan Kec. Mungka
17. Irigasi Bonda Namang Jorong Koto Kaciak Nagari Taeh Baruah
18. Irigasi Lokuak Boncah Jrg. Banjar Sari Nagari Labuah Gunuang
19. Lanjutan Irigasi Bonda Taren Jorong Dalam Koto Nagari Taeh Baruah
20. DAM Irigasi Talao Samping MDA Sungai Rimbang
21. Irigasi Bonda Cacing Baliak Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang
22. Irigasi Koto Kaciak Nag. Sei. Kamuyang Kec. Luak



Gambar 3.6
D.I Namang Simalanggang



Gambar 3.7
D.I Bdr Sandaran Bubua



Gambar 3.8
D.I Sarasah Tanggo



Gambar 3.9
D.I Lurah Cimpago



Gambar 3.10
D.I Solok Barunbun

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada tahun 2022 diantaranya sebagai berikut:

1. D.I Lurah Batapuak
2. Lanjutan Pemeliharaan Saluran Irigasi D.I Batu Nan Posuak Nagari Mungo Kecamatan Luak
3. Rehab Saluran Irigasi Burai (Lanjutan)
4. Rehab Tali Bandar Tabek Kubang - Kampai Jorong Tanjung Tengah
5. Survey dan Inventarisasi Daerah Irigasi (E-Paksi)
6. Perencanaan Jaringan Irigasi DAK
7. Rehab Tali Bandar Sawa Bage - Taruko Jorong Balai Gadang Atas Nagari Mungo
8. Rehab Irigasi Tali Bandar Junguik Jr. Gantiang Nag. Taram



Gambar 3.11
D.I Lurah Batapuak

3.3.2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat

Realisasi target kinerja dari sasaran strategis ini sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja (Sasaran Strategis 2)

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
1	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	81,62%	80,48%	83,12%	81,7%
2	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	78,45%	76,65%	78,05%	80,05%

Berdasarkan tabel di atas dapat diterangkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di

seluruh kabupaten pada tahun 2022 ditargetkan 83,12% dan terealisasi 81,7% atau meningkat sebesar 1,22% dibandingkan capaian tahun 2021.

Program dan Kegiatan utama untuk mendukung pencapaian Target IKU ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Program dan Kegiatan utama untuk mendukung pencapaian Target IKU
rumah tangga yang memperoleh akses air minum

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10.036.253.900	2.023.259.500	8.012.994.400	20,16
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.206.013.900	1.770.381.500	3.435.632.400	34,01
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4.830.240.000	252.878.000	4.577.362.000	5,24

Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 diantaranya sebagai berikut :

1. Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Nagari Halaban Kec. Lareh Sago Halaban
2. Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Nagari VII Koto Talago Kec. Guguk
3. Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Nagari Simpang Sugiran Kec. Guguk
4. Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Nagari Gunuang Malintang Kec. Pangkalan Koto Baru
5. Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Nagari Galugua Kec. Kapur IX
6. Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Nagari Kubang Kec. Guguk
7. Pengadaan Air Bersih Lereng Gunuang Jorong Kurai

Untuk Pencapaian realisasi anggaran pada program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum masih 20,16%. Hal ini disebabkan karena berkurangnya pagu DAK Bidang air minum sebesar Rp.7.384.427.000,- dari yang direncanakan dalam Pagu Transfer Kedaerah Dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp. 9.375.227.000,- dan telah di masukkan

kedalam DPA Dinas PUPR Tahun Anggaran 2022. Akibatnya pagu DAK bidang air minum dalam DPA tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.990.800.000,- atau berkurang sebesar Rp.7.384.427.000,- dari Pagu TKDD. Dan juga rendahnya realisasi penyerapan anggaran disebabkan oleh adanya tunda bayar di beberapa kegiatan dalam program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

- b. Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak pada tahun 2022 ditargetkan 78,05% dan teralisasi 80,05%.

Tabel 3.9
Program dan Kegiatan Utama Untuk Mendukung Pencapaian Target IKU
Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.038.021.000	5.750.742.598	287.278.402	95,24
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	6.038.021.000	5.750.742.598	287.278.402	95,24

Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air pada tahun 2022 diantaranya sebagai berikut:

1. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Halaban Kec. Lareh Sago Halaban
2. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Sitanang Kec. Lareh Sago Halaban
3. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Bukik Sikumpa Kec. Lareh Sago Halaban
4. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Sungai Rimbang Kec. Suliki
5. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Sungai Naniang Kec. Bukik Barisan
6. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Koto Tangah Kec. Bukik Barisan
7. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Tanjuang Balik Kec. Pangkalan Koto Baru
8. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Koto Tinggi Kec. Gunuang Omeh
9. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Koto Alam Kec. Pangkalan Koto Baru

10. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Galugua
Kec. Kapur IX
11. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Koto Lamo
Kec. Kapur IX
12. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Sariak
Laweh Kec. Akabiluru
13. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Harau Kec.
Harau
14. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Andaleh
Kec. Luak
15. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari
Simalanggang Kec. Payakumbuh



Gambar 3.12

Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Kec. Lareh Sago Halaban



Gambar 3.13

Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Andaleh Kec. Luak



Gambar 3.14

Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Koto Lamo Kec. Kapur IX



Gambar 3.15

Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Koto Tengah
Kec. Bukik Barisan



Gambar 3.16

Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Sungai Naniang
Kec. Bukik Barisan



Gambar 3.17

Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Koto Alam Kec. Pangkalan Koto Baru

3.3.3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah

Realisasi target kinerja dari sasaran strategis ini sebagai berikut :

Tabel 3.10

Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja (Sasaran Strategis 3)

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
1	Persentase ketaatan terhadap RTRW	65%	70%	70%	70%

Berdasarkan tabel di atas dapat diterangkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja Persentase ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2022 ditargetkan 70% dan terealisasi 70% atau sama dengan capaian tahun 2021.

Program dan Kegiatan utama untuk mendukung pencapaian Target IKU ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11

Program dan Kegiatan utama untuk mendukung pencapaian Target IKU penataan ruang kawasan yang sesuai RTRW

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	568.860.000	533.357.160	35.502.840	93,76
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1.650.000	1.650.000	0	100
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	566.320.000	531.207.160	35.112.840	93,80
		Sosialisasi	890.000	500.000	390.000	56,18

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
		Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	6.930.000	6.815.000	115.000	98,34
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	6.930.000	6.815.000	115.000	98,34
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	8.325.000	8.310.000	15.000	99,82
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	8.325.000	8.310.000	15.000	99,82

3.3.4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota adalah Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target tahun 2022 adalah 100% dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.454.000	115.215.000	239.000	99,79
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.570.000	47.498.000	72.000	99,85
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.884.000	42.744.000	140.000	99,67
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	24.973.000	27.000	99,89
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.102.834.228	6.701.156.422	401.677.806	94,34
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.066.814.228	6.667.915.922	398.898.306	94,36
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.740.000	5.582.000	2.158.000	72,12
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se	8.560.000	8.368.000	192.000	97,76

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
		mesteran SKPD				
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	19.720.000	19.290.500	429.500	97,82
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.496.426	296.311.941	5.184.485	98,28
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	14.910.000	90.000	99,40
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	75.146.000	4.854.000	93,93
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.441.426	45.421.800	19.626	99,96
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	7.000.000	0	100
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000	34.872.000	128.000	99,63
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.055.000	118.962.141	92.859	99,92
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	993.678.000	988.752.441	4.925.559	99,50
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	7.250.000	750.000	90,63
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.728.000	85.559.441	168.559	99,80
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.300.000	27.134.000	166.000	99,39
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	872.650.000	868.809.000	3.841.000	99,56
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	710.247.600	688.346.342	21.901.258	96,92
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225.750.000	211.376.193	14.373.807	93,63
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	305.631.400	300.057.900	5.573.500	98,18
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	178.866.200	176.912.249	1.953.951	98,91

Realisasi Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 dibandingkan dengan tahun akhir perencanaan (Tahun 2022) sebagai berikut :

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	57,05%	58,02%	101,7%
		Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	83,02%	84,45%	101,72%
2	Meningkatkan layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	83,12%	81,7%	98,29%
		Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	78,05%	80,05%	102,56
3	Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah	Persentase ketaatan terhadap RTRW	70%	70%	100%
4	Meningkatnya Reformasi Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80,55%	77,64%	96,39%
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja					100,11%

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa :

- a. Capaian Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2022 sudah bagus, bahkan telah melewati target yang direncanakan.
- b. Capaian Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2022 sudah bagus, bahkan telah melewati target yang direncanakan.
- c. Capaian Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum pada tahun 2022 belum mencapai target, namun sudah mendekati target. Kekurangan ini harus ditambahkan ke target tahun berikutnya dan diusahakan untuk dapat dicapai.
- d. Capaian Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak pada tahun 2022 sudah bagus, bahkan telah melewati target yang direncanakan.
- e. Capaian Persentase ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2022 sudah bagus karena target sudah tercapai.
- f. Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum mencapai target, namun sudah mendekati target. Kekurangan ini harus ditambahkan ke target tahun berikutnya dan diusahakan untuk dapat dicapai.

Indikator kinerja yang tercapai targetnya pada tahun 2022 adalah :

- a. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap
- b. Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik

- c. Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak
- d. Persentase ketaatan terhadap RTRW

Faktor-faktor pendorong pencapaian kinerja ini adalah :

- a. Semangat kerja, disiplin yang tinggi dan kesungguhan dari aparatur
- b. Terlaksananya monev secara rutin dan berkala atas kemajuan pelaksanaan kegiatan
- c. Terlaksananya pengendalian kegiatan secara baik oleh pengelola dan penanggung jawab kegiatan

Adapun Indikator kinerja yang belum tercapai targetnya pada tahun 2022 adalah:

- a. Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum
- b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja pada tahun 2022 adalah :

- a. Kurangnya kapasitas air dalam jaringan pipa air minum, sehingga tidak bisa lagi banyak menambah layanan kepada masyarakat.
- b. Keterbatasan anggaran dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembuatan pengolahan air limbah domestik yang aman.

3.4. Realisasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 adalah sebesar **Rp.138.432.561.925** yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan 2 (dua) urusan, yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Pertanahan. Jumlah program sebanyak 14 program, 25 kegiatan dan 66 sub kegiatan.

Sampai akhir Desember 2022, capaian kinerja kegiatan secara fisik mencapai 96,38 %, artinya hampir semua kegiatan yang dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilaksanakan.

Adapun realisasi anggaran untuk setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Dinas PUPR Tahun Anggaran 2022

No	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	490.000.000	790.857.200	104.900.000	13,26
		Rekonstruksi Jalan	62.374.719.000	61.895.479.000	45.375.743.447	73,31

No	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
		Pemeliharaan Berkala Jalan	22.326.621.000	23.522.962.900	19.613.120.726	83,38
		Pemeliharaan Rutin Jalan	2.320.000.000	2.350.000.000	2.272.239.227	96,69
		Pembangunan Jembatan	4.120.000.000	1.590.576.740	1.229.967.607	77,33
		Pemeliharaan Berkala Jembatan	335.000.000	335.000.000	179.744.000	53,66
2	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	179.285.000	204.285.000	200.570.196	98,18
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	191.250.000	191.250.000	190.489.000	99,60
		Normalisasi/Restorasi Sungai	1.282.050.000	1.347.050.000	1.342.060.000	99,63
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	134.282.000	134.282.000	132.656.000	98,79
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	654.500.000	654.500.000	650.496.000	99,39
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	7.275.158.968	7.271.658.968	6.008.268.487	82,63
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	4.686.911.804	1.354.687.031	1.218.135.100	89,92
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	13.875.000	13.875.000	13.850.000	99,82
3	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.040.507.400	5.206.013.900	1.770.381.500	34,01
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4.785.680.000	4.830.240.000	252.878.000	5,24
4	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	5.861.571.000	6.038.021.000	5.750.742.598	95,24
5	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	1.650.000	1.650.000	1.650.000	100
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	224.965.000	566.320.000	531.207.160	93,80
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	15.415.000	890.000	500.000	56,18
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	9.315.000	6.930.000	6.815.000	98,34
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	10.275.000	8.325.000	8.310.000	99,82
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.570.000	47.570.000	47.498.000	99,85
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.884.000	42.884.000	42.744.000	99,67

No	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	Ruang	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	25.000.000	24.973.000	99,89
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.448.301.195	7.066.814.228	6.667.915.922	94,36
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.740.000	7.740.000	5.582.000	72,12
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.560.000	8.560.000	8.368.000	97,76
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	19.720.000	19.720.000	19.290.500	97,82
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.046.000	15.000.000	14.910.000	99,40
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.673.400	80.000.000	75.146.000	93,93
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.262.366	45.441.426	45.421.800	99,96
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	7.000.000	7.000.000	100,00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.750.000	35.000.000	34.872.000	99,63
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.655.000	119.055.000	118.962.141	99,92
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	8.000.000	7.250.000	90,63
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	85.728.000	85.559.441	99,80
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.300.000	27.300.000	27.134.000	99,39
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	871.650.000	872.650.000	868.809.000	99,56
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.600.000	225.750.000	211.376.193	93,63
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	323.902.400	305.631.400	300.057.900	98,18
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	185.266.200	178.866.200	176.912.249	98,91

Anggaran dan realisasi anggaran yang disajikan di atas adalah anggaran perubahan 2022 karena berbeda dengan anggaran awal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3.5 Analisis Efisiensi Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 banyak melakukan efisiensi anggaran, diantaranya :

1. Tenaga Pengawas kegiatan konstruksi secara umum berasal dari personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang jauh lebih kecil honorinya dibandingkan dengan biaya konsultan pengawas.

2. Anggaran belanja pegawai dan belanja barang jasa yang berkaitan langsung dengan Aparatur yang kecil serta penggunaannya secara tepat dan efisien.

3.6 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2022, telah dilakukan Efisiensi dalam pemanfaatan Sumber Daya, diantaranya :

- a. Personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan diutamakan berasal dari internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kompetensi dan beban kerjanya.
- b. Kendaraan dinas yang ada digunakan semaksimal mungkin untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, terutama untuk monitoring dan mengontrol pekerjaan di lapangan.
- c. Peralatan kantor yang ada juga di digunakan semaksimal mungkin untuk mendukung administrasi kegiatan.

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat

Rekomendasi Inspektorat berdasarkan hasil evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

1. Dokumen Renstra agar dilakukan reviu secara berkala
2. Rencana kinerja tahunan agar dimanfaatkan sepenuhnya dalam penyusunan anggaran.

B. Pengukuran Kinerja

1. Agar pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dan menggunakan teknologi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan/dimanfaatkan sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment.
3. IKU agar direviu secara berkala

C. Pelaporan Kinerja

Agar informasi dalam Laporan Kinerja agar sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan organisasi, digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja secara maksimal.

D. Evaluasi Internal

Agar Hasil Evaluasi Rencana Aksi dapat sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata sehingga hasil evaluasi rencana aksi bisa berguna untuk perbaikan di masa yang akan datang.

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Capaian kinerja agar ditingkatkan supaya lebih baik dari tahun sebelumnya dan membuat revisi target dalam Perjanjian Kinerja apabila terjadi pergeseran/pengurangan anggaran.

F. Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang belum ditindaklanjuti

Tidak terdapat rekomendasi evaluasi tahun lalu.

Tindak Lanjut dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas Rekomendasi Inspektorat tersebut adalah sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

1. Telah dilakukan Reviu Dokumen Renstra
2. Rencana kinerja tahunan telah dimanfaatkan dalam penyusunan Renja Dinas

B. Pengukuran Kinerja

1. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang namun belum menggunakan teknologi informasi.
2. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dikaitkan/dimanfaatkan sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment.
3. IKU direviu pada tahun 2022, sebagai bahan penyusunan Renstra 2021-2026

C. Pelaporan Kinerja

Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan organisasi, digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja secara maksimal.

D. Evaluasi Internal

Hasil Evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Capaian kinerja berusaha ditingkatkan supaya lebih baik dari tahun sebelumnya

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah instansi pelaksana Pemerintah Daerah dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Pertanahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan 14 (empat belas) program dengan 25 (dua puluh lima) kegiatan dan 66 (enam puluh enam) sub kegiatan. Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar **Rp.138.432.561.925**

Dari (empat belas) program dengan 25 (dua puluh lima) kegiatan dan 66 (enam puluh enam) sub kegiatan tersebut, tercapai realisasi fisik sampai akhir Desember 2022 sebesar 96,38%, artinya hampir semua kegiatan yang dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2022 terlaksana dengan baik. Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan akhir Desember 2022 sebesar **Rp.101.942.650.804** atau sebesar 73,64% dari total alokasi belanja langsung. Sisa anggaran sebesar **Rp.36.489.911.121** atau sebesar 26,36 % yang menjadi SILPA.

4.2. Langkah peningkatan di Masa Datang

Secara umum hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 ada 2 hal :

1. Adanya tunda bayar dibeberapa rekening kegiatan sehingga menyebabkan rendahnya realisasi keuangan.
2. Adanya dana Transfer Kedaerah dan Dana Desa (TKDD) yang tidak sesuai dengan dana transfer yang diberikan oleh Kementerian Keuangan RI untuk Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
3. Ada 2 paket kegiatan air minum yang tidak dilaksanakan, karena adanya penolakan oleh masyarakat dan belum terpenuhinya syarat teknis dilapangan.

Menyikapi hambatan tersebut maka untuk tahun mendatang diharapkan :

1. Tidak ada pekerjaan yang tunda bayar.
2. Sebelum menetapkan kegiatan tersebut direncanakan dengan sebaik-baiknya.

4.3. Saran untuk Perencanaan Mendatang :

Dalam rangka peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja pada masa yang akan datang, kami menyarankan beberapa hal berikut :

- a. Perlu adanya kegiatan yang khusus untuk melakukan pendataan dan menghitung kondisi eksisting capaian kinerja saat ini, sekarang capaian kinerja yang disampaikan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini tentu harus didukung dengan pendanaan yang memadai.
- b. Perlu alokasi anggaran dari TAPD untuk mengakomodir usulan kegiatan dari Nagari dan Kecamatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022, semoga dapat menggambarkan Kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2022.

Tabek Panjang, Februari 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota



RILZA HANIF, SST
NIP. 19720625 199202 1 001